



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

# 2024

**ORI**



---

[ombudsman.go.id](http://ombudsman.go.id)



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya Biro Perencanaan dan Keuangan dapat melaksanakan dan merampungkan seluruh tugas dan fungsi pada tahun 2024 dengan baik sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Laporan Kinerja Biro disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pelaksanaan kegiatan pada Layanan Perencanaan, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Manajemen Keuangan. Laporan Kinerja (LKj) juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan koordinasi dan kinerja yang lebih baik di Biro Perencanaan dan Keuangan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, 31 Desember 2024  
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Latif Maulana Razak

## IKHTISAR LAPORAN

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah “Terlaksananya layanan perencanaan, manajemen, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas”. Sasaran tersebut diukur dari indikator kinerja yaitu indeks keberhasilan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target nilai indeks sebesar 3,10 (skala 4). Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 yaitu **3,30** dengan persentase capaian sebesar **106,44%**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Nilai aspek Implementasi Biro Perencanaan dan Keuangan (33,3%) dengan nilai 70,90;
2. Nilai Aspek Manfaat Biro Perencanaan dan Keuangan (66,7%) dengan nilai 88,27.

Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyusun 5 (lima) dokumen laporan triwulan/tahunan sesuai dengan target perjanjian kinerja, yang terdiri atas 7 dokumen perencanaan dan penganggaran, 6 dokumen pemantauan dan evaluasi, serta 32 dokumen manajemen keuangan.

Kinerja Keuangan dari alokasi anggaran sebesar **Rp120.738.347.000** dengan realisasi **Rp117.843.081.049 (97,61%)**, mengingat semua target pada indikator kinerja Tahun 2024 telah dicapai, **maka realisasi capaian target berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan termasuk kategori berhasil.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
IKHTISAR LAPORAN.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang .....	6
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	7
BAB II RENCANA KINERJA.....	9
A. Penetapan Kinerja .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
A. Analisis Kinerja .....	14
B. Anggaran .....	19
BAB IV PENUTUP.....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan kepada Pimpinan Lembaga setiap tahun menyusun Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada atasan masing-masing. Penyusunan LKj merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKj, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi.

SAKIP juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik penyimpangan. Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, menjadi komitmen Biro Perencanaan dan Keuangan mendukung reformasi

birokrasi di lingkungan Ombudsman RI termasuk perubahan dan peningkatan kualitas di bidang perencanaan dan keuangan.

## **B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Ombudsman Republik Indonesia dipercayakan melakukan pengawasan terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintah. Dalam hal mendukung tugas tersebut pasal 2 Pasal Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan, Sekretariat Jenderal terdiri atas 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Inspektorat.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 2 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Bab II bagian 1 Pasal 5 dan 6 menyebutkan Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- 1) Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
  - melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan, akuntansi, dan pelaporan.
- 2) Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pemantauan dan evaluasi;
  - b. Koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
  - c. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan; dan
  - d. Pelaksanaan administrasi Biro.

### C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Biro Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Biro setingkat Eselon II.a yang membawahi satu unit eselon IV dan kelompok jabatan fungsional Bidang Perencanaan dan fungsional Bidang Perbendaharaan dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

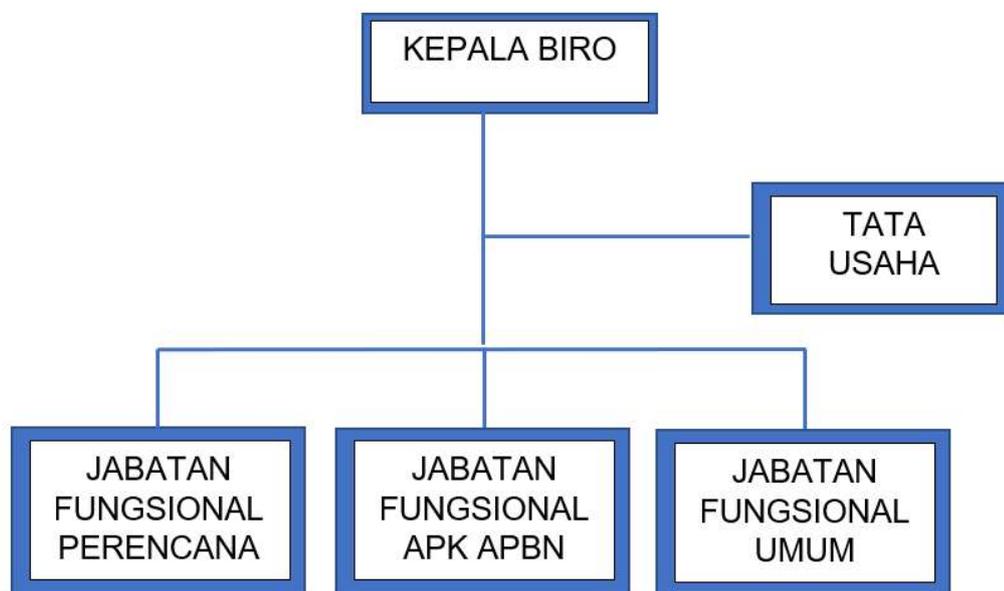
1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pada Biro Perencanaan dan Keuangan.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan



Dalam peyelenggaraan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang yang terdiri dari:

1. Kepala Biro : 1 orang
2. Kepala Subbagian : 1 orang
3. Fungsional Tertentu : 33 orang
4. Fungsional Umum : 52 orang
5. Tenaga Analis : 3 orang
6. Tenaga Pendukung : 2 orang

dengan rincian sebagai berikut:

No	Gol/Ruang	Jumlah
1	IV/d	-
2	IV/c	1
3	IV/b	3
4	IV/a	-
5	III/d	12
6	III/c	23

No	Gol/Ruang	Jumlah
7	III/b	22
8	III/a	14
9	II/d	8
10	II/c	-
11	II/b	4

## BAB II

### RENCANA KINERJA

#### A. Penetapan Kinerja

Program dan kegiatan pada Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri tiga Layanan Kegiatan, yakni Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, serta Layanan Manajemen Keuangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan telah menandatangani Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

#### Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan - Aspek Implementasi (33,3%) 1. Capaian Rincian Output 2. Nilai Efisiensi Unit Kerja 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 4. Penyerapan Anggaran - Aspek Manfaat (66,7%)	3,10	
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Triwulan, dan Tahunan	6	

Dalam perjanjian kinerja tersebut, Perencanaan dan Keuangan memiliki dua indikator kinerja, yakni indeks kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target skala 3,10 dari indeks 4, serta Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan dengan target 6 Dokumen.

1. Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Terdiri dari Aspek Implementasi (33,3%) dan Aspek Manfaat (66,7%).

Berikut rincian aspek implementasi dan aspek manfaat:

Indikator	Tar get	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
<b>Aspek Implementasi</b>					
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7	Dokumen	7	100%	Dokumen Rancangan Grand Design K/L 2025-2045, Dokumen Rancangan Renstra 2025-2029, Dokumen RKAK/L, Dokumen Pemutakhiran Renja K/L, Dokumen Revisi Renja K/L, Dokumen Revisi RKA KL TA 2024 dan Revisi POK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	Laporan	6	100%	Laporan Tahunan 2023, Laporan Kinerja 2023, Laporan Triwulan IV Tahun 2023, Laporan Triwulan I, II dan III TA 2024
Layanan Manajemen Keuangan	32	Dokumen	32	100%	12 Dokumen Perbendaharaan, 12 Dokumen Kegiatan Pengelolaan Keuangan Perwakilan, Laporan Keuangan TA 2023 <i>Unaudited</i> dan <i>Audited</i> , Laporan Keuangan Semester I dan Triwulan II TA 2024, 4 Laporan Pengelolaan Dokumentasi Keuangan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024
Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100%	1 Layanan

Indikator	Target	Bobot	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
<b>Aspek Manfaat</b>					
Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA KL	100	20%	93,03	93,03%	Data Realisasi 2024
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	20%	94,25	94,25%	Nilai IKPA Tahun 2024
Nilai SAKIP	100	10%	73,75	73,75%	Nilai SAKIP Biro Renkeu Tahun 2024
Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Manajemen Keuangan	4 (Skala 4)	10%	3	75%	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Manajemen Keuangan Tahun 2024
Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Biro Perencanaan dan Keuangan	A	10%	B	80%	Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Biro Renkeu Tahun 2023
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terhadap Pegawai pada Biro Renkeu	100%	10%	100%	100%	Temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020 sebanyak 5 temuan dan telah ditindaklanjuti semua, sedangkan atas Laporan Keuangan Tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak ada temuan
Nilai Pengelolaan Arsip Biro Renkeu	100 (Skala 100)	10%	79,42	79,42%	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal atas Biro Perencanaan Tahun 2023
Rasio Pegawai yang Meningkatkan Kinerjanya melalui Coaching/ Mentoring/ Counseling (CMC)	100%	5%	100%	100%	Telah Dilakukan Coaching/ Mentoring/ Counseling (CMC) di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan pada Tahun 2023 dan dihadiri oleh 75% Insan Biro Renkeu
Persentase Tindak Lanjut Unit Kerja atas Temuan Aduan dan Saran Penjaminan Mutu	100%	5%	100%	100%	Tidak ada temuan aduan Biro Renkeu di Tahun 2023

## 2. Jumlah Dokumen Laporan Triwulan/Tahunan

Jumlah dokumen terdiri dari laporan triwulan I, II, dan III Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023, laporan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022, serta laporan tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022.

Perjanjian kinerja ini kemudian akan dievaluasi setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran. Realisasi perjanjian kinerja ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perjanjian kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	3,10
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6

<b>KRO/RO/KOMPONEN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>KRO1 : Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>Rp 1.485.657.000</b>
RO1 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 637.889.000
RO2 : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 369.597.000
RO3 : Layanan Manajemen Keuangan	Rp 478.171.000
<b>KRO2 : Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>Rp 126.385.231.000</b>
RO1 : Layanan Perkantoran	Rp 126.385.231.000
Komp1 : <i>Gaji dan Tunjangan</i>	Rp 122.791.991.000
Komp2 : <i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	Rp 3.593.240.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 127.870.888.000</b>

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

ttd

ttd

Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP. 197309161993111001

Latif Maulana Razak  
NIP. 197304161994021001

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Analisis Kinerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan telah menandatangani Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Perhitungan capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan didapatkan dari realisasi atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada awal tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel I Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian (%)	Keterangan
Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan - Aspek Implementasi (33,3%) 5. Capaian Rincian Output 6. Nilai Efisiensi Unit Kerja 7. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 8. Penyerapan Anggaran - Aspek Manfaat (66,7%)	3,10	106,44%	Nilai Aspek Implementasi (33,3%): <b>70,90</b> Nilai Aspek Manfaat (66,7%): <b>88,27</b>
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Triwulan, dan Tahunan	6	100%	Laporan Tahunan Biro TA 2023, LKj Biro TA 2023, Laptri IV TA 2023, Laptri I, II dan III TA 2024

Dalam perjanjian kinerja tersebut, Biro Perencanaan memiliki 2 indikator kinerja, yakni indeks kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target

3,10 dari indeks skala 4 dan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan dengan target 6 Dokumen.

1. Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Perhitungan Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan berdasar pada aspek implementasi dengan bobot 33,3% dan aspek manfaat dengan bobot 66,7%.

**Tabel II Nilai Aspek Implementasi**

Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
<b>Aspek Implementasi</b>					
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7	Dokumen	7	100%	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dokumen Revisi 1 dan 2 RKA K/L TA 2024
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	Laporan	6	100%	Laporan Tahunan 2023, Laporan Kinerja 2023, Laporan Triwulan IV Tahun 2023, Laporan Triwulan I, II dan III TA 2024
Layanan Manajemen Keuangan	32	Dokumen	32	100%	12 Dokumen Perbendaharaan, 12 Dokumen Kegiatan Pengelolaan Keuangan Perwakilan, Laporan Keuangan TA 2023 <i>Unaudited</i> dan <i>Audited</i> , Laporan Keuangan Semester I, Laporan Keuangan Triwulan II TA 2024, 4 Laporan Pengelolaan Dokumentasi Keuangan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024
Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100%	Terealisasi pada akhir tahun

Pada aspek implementasi,

1. Realisasi Capaian Output sebesar 44,38 dengan bobot 43,50% sehingga nilai yang diambil dari Capaian Rincian Output sebesar 19.15

2. Realisasi Nilai Efisiensi Unit Kerja sebesar 86,62 dengan bobot 28,6% sehingga nilai yang diambil dari Nilai Efisiensi Unit Kerja sebesar 24,77
3. Realisasi Konsistensi Penyerapan Anggaran sebesar 95,36 dengan bobot 18,2% sehingga nilai yang diambil dari Konsistensi Penyerapan Anggaran sebesar 17,36
4. Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 97,60 dengan bobot 9,7% sehingga nilai yang diambil dari Penyerapan Anggaran 9,47

Total nilai Aspek Implementasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 70,90.

**Tabel III Nilai Aspek Manfaat**

Indikator	Target	Bobot	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
<b>Aspek Manfaat</b>					
Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA KL	100	20%	93,03	93,03%	Penilaian pada akhir tahun
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	20%	94,25	94,25%	Nilai per Desember
Nilai SAKIP	100	10%	73,75	73,75%	Penilaian pada akhir tahun
Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Manajemen Keuangan	4 (Skala 4)	10%	3	75%	Penilaian pada akhir tahun
Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Biro Perencanaan dan Keuangan	A	10%	B	80%	Penilaian pada akhir tahun
Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terhadap Pegawai pada Biro Renkeu	100%	10%	100	100%	Tidak ada temuan pada tahun 2024 pada Biro Renkeu
Nilai Pengelolaan Arsip Biro Renkeu	100	10%	79,42	79,42%	Nilai arsip biro
Rasio Pegawai yang Meningkatkan Kinerjanya melalui Coaching/ Mentoring/ Counseling	100%	5%	100	100%	Penilaian dilakukan sampai dengan Desember
Persentase Tindak Lanjut Unit Kerja atas Temuan Aduan dan Saran Penjaminan Mutu	100%	5%	5	100%	Indeks Kepuasan belum dapat dilakukan penilaian karena bersifat nilai tahunan

Pada Aspek Manfaat,

1. Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA KL pada akhir tahun sebesar 93,03 dengan bobot 20% atau sama dengan 18,606;
2. Realisasi Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 94,25, nilai yang diambil dari indikator Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 20% dari 94,25 yakni 18,85;
3. Nilai atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Biro Renkeu pada akhir tahun sebesar 73,75 dengan pembobotan 10% yakni dengan nilai 7.375;
4. Penilaian atas Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Biro Renkeu dilaksanakan pada akhir tahun;
5. Penilaian atas pengelolaan arsip Biro Renkeu sebesar 79,42 , nilai yang diambil dari indikator nilai pengelolaan arsip sebesar 10% dari 79,42 yakni 7,94;
6. Penilaian atas Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terhadap Pegawai pada Biro Renkeu, tidak terdapat temuan dalam pelaksanaan anggaran biro tahun 2024, sehingga nilainya adalah 10;
7. Penilaian atas Realisasi Persentase Tindak Lanjut Unit Kerja atas Temuan Aduan dan Saran Penjaminan Mutu sebesar 80% dengan bobot 10% dengan nilai 8;
8. Penilaian atas persentase indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan realisasi sebesar 100%, dengan pembobotan 10% nilai menjadi 10;
9. Penilaian atas Realisasi Rasio Pegawai yang Meningkatkan Kinerjanya melalui Coaching/Mentoring/Counseling (CMC) dilaksanakan selama Tahun 2024 sebesar 100 %, dengan bobot sebesar 5% menjadi 5.

Total nilai aspek manfaat pada biro perencanaan dan keuangan adalah sebesar 88,27.

### Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Bobot	Realisasi	<b>Nilai</b> <i><math>(Bobot \times 4) \times Realisasi</math></i> 100
Aspek Implementasi	33,3%	70,90	0,94
Aspek Manfaat	66,7%	88,27	2,36
<b>Total Nilai Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan</b>			<b>3,30</b>

Berdasarkan perhitungan sebelumnya telah diketahui bahwa total nilai Aspek Implementasi 70,90 dan total nilai Aspek Manfaat 88,27. Sehingga dapat dilakukan perhitungan Nilai Indeks Kinerja Biro Perencanaan dengan memasukkan rumus:

$$\frac{(Bobot \times 4) \times Realisasi}{100}$$

Didapatkan nilai yang diambil dari Aspek Implementasi sebesar 0,94 dan Aspek Manfaat sebesar 2,36. Total Nilai Indeks Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 3,30 dari skala 4 atau sebesar 82,5% dari target 4,00 dengan indeks skala 4.

- b. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan
- Pada Tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyusun 6 Dokumen Pelaporan, yakni Laporan Tahunan Biro Renkeu Tahun 2023, Laporan Kinerja Biro Renkeu Tahun 2023, Laporan Triwulan IV Biro Renkeu Tahun 2023, Laporan Triwulan I, Laporan Triwulan II dan Laporan Triwulan III Tahun 2024.

## B. Anggaran

Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi terakhir, pagu efektif yang dikelola Biro Perencanaan dan Keuangan setelah pemblokiran anggaran menjadi sebagai berikut:

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.039.141.000	1.007.264.853	96,93	31.876.147
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	519.597.000	513.986.386	98,92	5.610.614
Layanan Manajemen Keuangan	709.875.000	685.993.667	96,64	23.881.333
Layanan Perkantoran	118.472.377.604	114.602.074.094	97,60	2.823.623.510
Jumlah	120.740.990.604	116.809.319.000	96,74	3.931.671.604

Realisasi penyerapan anggaran pada Biro Perencanaan dan Keuangan per Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp2.207.244.906 atau sama dengan 97,29%, dengan rincian sebagai berikut:

### Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Triwulan IV TA 2024

REALISASI TRIWULAN IV BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TA 2024		PAGU	REALISASI	%	SISA
WA.4051	Perencanaan dan Keuangan	2.268.613.000	2.207.244.906	97,29	61.368.094
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.268.613.000	2.207.244.906	97,29	61.368.094
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.039.141.000	1.007.264.853	96,93	31.876.147
051	Penyusunan Perencanaan	742.761.000	731.062.808	98,43	11.698.172
051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	742.761.000	731.062.808	98,43	11.698.172
	521211 Belanja Bahan	8.000.000	0	0,00	8.000.000
	522131 Belanja Jasa Konsultan	272.984.000	272.310.750	99,75	673.250
	522151 Belanja Jasa Profesi	16.000.000	14.100.000	88,13	1.900.000
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	296.577.000	295.452.078	99,62	1.124.922

	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	149.200.000	149.200.000	100	0
052	Penyusunan Penganggaran		296.380.000	276.202.025	93,19	20.177.975
052.0A	TANPA SUB KOMPONEN		296.380.000	276.202.025	93,19	20.177.975
	521211	Belanja Bahan	4.209.000	0	0,00	4.209.000
	522151	Belanja Jasa Profesi	14.400.000	11.700.000	81,25	2.700.000
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.512.000	25.469.667	99,83	42.333
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	171.325.000	160.860.000	93,89	10.465.000
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	80.934.000	78.172.358	96,59	2.761.642
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		519.597.000	513.986.386	98,92	5.610.614
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		519.597.000	513.986.386	98,92	5.610.614
051.0A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		197.650.000	195.630.886	98,98	2.019.114
	522151	Belanja Jasa Profesi	2.700.000	2.700.000	100	0
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.440.000	124.420.886	99,98	19.114
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.160.000	10.690.000	87,91	1.470.000
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	58.350.000	57.820.000	99,09	530.000
051.0B	Penyusunan Laporan Triwulan, Tahunan, dan Kinerja		276.822.000	273.935.500	98,36	58.511.500
	521211	Belanja Bahan	149.382.000	148.895.000	64,98	52.311.500
	522191	Belanja Jasa Lainnya	3.600.000	3.600.000	66,67	1.800.000
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	123.840.000	121.440.000	98,06	2.400.000
051.0C	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan III TA 2024		45.125.000	44.420.000	98,44	705.000
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	535.000	0	0	535.000
	522151	Belanja Jasa Profesi	1.800.000	1.800.000	100	0
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	42.790.000	42.620.000	99,60	170.000
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		709.875.000	685.993.667	96,64	23.881.333
051	Pengelolaan Keuangan Pusat		203.701.000	201.161.857	98,75	2.539.143

051.0A	TANPA SUB KOMPONEN		203.701.000	201.161.857	98,75	2.539.143
	521211	Belanja Bahan	8.111.000	8.031.857	99,02	79.143
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	750.000	100	0
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	194.840.000	192.380.000	98,74	2.460.000
<b>052</b>	<b>Pengelolaan Keuangan Perwakilan</b>		<b>265.320.000</b>	<b>264.271.810</b>	<b>99,02</b>	<b>2.539.143</b>
052.0A	Fasilitasi Keuangan Perwakilan		265.320.000	262.271.810	99,02	2.539.143
	522151	Belanja Jasa Profesi	3.600.000	3.600.000	100	0
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142.200.000	141.841.810	99,75	358.190
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	119.520.000	118.830.000	99,42	690.000
<b>053</b>	<b>Akuntansi dan Pelaporan</b>		<b>240.854.000</b>	<b>220.560.000</b>	<b>91,57</b>	<b>20.924.000</b>
053.0A	Pengelolaan Akuntansi		240.854.000	220.560.000	91,57	20.924.000
	521211	Belanja Bahan	13.000.000	11.780.000	90,62	1.220.000
	522191	Belanja Jasa Lainnya	14.380.000	10.300.000	71,63	4.080.000
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	213.474.000	198.480.000	92,98	14.994.000

Tabel di atas menggambarkan penyerapan Biro Perencanaan dan Keuangan pada Triwulan IV Tahun 2024, dengan rincian:

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan pagu Rp1.039.141.000 terealisasi sebesar Rp1.007.264.853 (96,93%);
2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan pagu Rp519.597.000 terealisasi sebesar Rp513.986.386 (98,92%);
3. Layanan Manajemen Keuangan dengan pagu Rp709.875.000 terealisasi sebesar Rp685.993.667 (96,64%).

## Realisasi Anggaran Operasional Perkantoran Triwulan IV TA 2024

REALISASI TRIWULAN IV BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TA 2024		PAGU	REALISASI	%	SISA
WA.5094	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan dan Kerumahtangaan	118.472.377.604	115.635.836.143	97,61	2.836.541.461
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	117.425.697.604	114.602.074.094	97,60	2.823.623.510
EBA.994	Layanan Perkantoran	117.425.697.000	114.602.074.094	97,60	2.823.623.510
001	Gaji dan Tunjangan	107.449.432.000	105.237.945.781	97,94	2.211.486.219
001.0A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	39.711.740.000	38.870.726.185	97,88	841.013.815
001.0B	Penghasilan Ombudsman	3.300.878.000	3.297.788.444	99,91	3.089.556
001.0C	Tunjangan Ombudsman	3.548.100.000	3.275.310.056	92,31	272.789.944
001.0D	Honorarium Asisten Ombudsman	28.143.476.000	28.059.668.263	99,70	83.807.737
001.0E	Tunjangan Asisten Ombudsman	26.045.142.000	25.257.283.318	96,98	787.858.682
001.0F	Penghasilan/Tunjangan Kepala Perwakilan	6.700.096.000	6.477.169.515	96,67	222.926.485
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	11.022.945.604	10.397.890.362	94,33	635.055.242
002.0C	Pengelolaan Kegiatan Keuangan	736.008.000	697.328.815	94,74	38.679.185
	521111 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	632.352.000	593.802.000	93,90	38.550.000
	521211 Belanja Bahan	103.656.000	103.526.815	99,88	129.185
002.0F	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.000.000	198.626.730	99,81	373.270
	523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.000.000	198.626.730	99,81	373.270
002.0M	Fasilitasi Rapat Kerja	4.821.257.000	4.658.381.460	96,62	162.875.540
	521111 Belanja Bahan	290.436.000	282.464.750	97,26	7.971.250
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	774.220.000	770.946.150	99,58	3.273.850
	522151 Belanja Jasa Profesi	99.000.000	91.600.000	92,53	7.400.000
	522191 Belanja Jasa Lainnya	328.000.000	327.991.680	99,99	8.320
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	859.649.000	803.200.430	93,43	56.448.570
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.117.502.000	1.045.540.000	93,56	71.962.000

	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.352.450.000	1.336.638.450	98,83	15.811.550
002.0N	Koordinasi Pengelolaan Administrasi Anggaran dan Keuangan Perwakilan		1.332.816.000	1.256.271.995	94,26	76.544.055
	521111	Belanja Bahan	98.000.000	98.000.000	100	0
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	199.443.000	164.992.084	82,73	34.450.916
	522151	Belanja Jasa Profesi	27.200.000	11.500.000	42,28	15.700.000
	522191	Belanja Jasa Lainnya	142.000.000	141.450.000	99,61	550.000
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	155.089.000	155.089.000	100	0
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	454.520.000	454.520.000	100	0
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	256.564.000	230.720.911	89,93	25.843.089
002.0P	Fasilitasi Penguatan Pengelolaan Tata Usaha Biro		2.209.159.604	2.008.482.938	90,92	200.676.666
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	683.501.000	661.235.938	96,74	22.265.062
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	90.770.000	49.682.340	54,73	41.087.660
	521211	Belanja Bahan	27.720.000	7.685.000	28,37	19.855.000
	522191	Belanja Jasa Lainnya	109.528.000	104.424.000	95,34	5.104.000
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	606.198.000	605.441.658	99,88	756.342
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.643.604	39.710.000	63,39	22.933.604
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	522.659.000	453.060.000	86,68	69.599.000
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	106.140.000	87.065.002	82,03	19.075.998
002.0Q	Fasilitasi Penguatan Perencanaan		677.100.000	545.036.375	46,09	365.000.000
	521211	Belanja Bahan	13.260.000	12.206.375	0,00	13.260.000
	522151	Belanja Jasa Profesi	24.000.000	13.700.000	0,00	24.000.000
	522191	Belanja Jasa Lainnya	177.100.000	69.300.000	21,74	138.600.000
	524113	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	8.500.000	0	0,00	8.500.000

	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	454.240.000	450.010.000	60,23	180.640.000
002.0S	Dukungan Pengawasan Lainnya		925.000	0	0,00	925.000
	521211	Belanja Bahan	925.000	0	0,00	925.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1.046.680.000	1.033.762.049	97,94	12.917.951
EBB.951	Layanan Sarana Internal		1.046.680.000	1.033.762.049	97,94	12.917.951
051	Sarana Perkantoran		1.046.680.000	1.033.762.049	97,94	12.917.951
001.0A	Pengadaan Pusat		1.046.680.000	1.033.762.049	98,77	12.917.951
	532111	Belanja Modal	1.046.680.000	1.033.762.049	98,77	12.917.951

Tabel di atas menggambarkan penyerapan Gaji dan Tunjangan serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang dikelola oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada Triwulan IV Tahun 2024, dengan rincian:

1. Gaji dan Tunjangan dengan pagu Rp107.449.432.000 terealisasi sebesar Rp105.237.945.781 (97,94%);
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan pagu Rp11.022.954.604 terealisasi sebesar Rp10.397.890.362 (94,33%)
3. Sarana Perkantoran dengan pagu Rp1.046.680.000 terealisasi sebesar Rp1.033.762.049 (97,94%)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 atas nilai aspek implementasi dengan bobot 33,3% terhadap Capaian Rincian Output, Nilai Efisiensi Unit Kerja, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, dan Penyerapan Anggaran mendapatkan nilai 62,80%

Untuk nilai aspek manfaat dengan bobot 66,7% terhadap Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA KL, Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai SAKIP, Nilai Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Manajemen Keuangan mendapatkan nilai 88,27%. Total penyerapan dari pagu anggaran efektif Rp120.740.990.604 realisasi sebesar Rp117.843.081.049 (97,60%) dengan sisa anggaran Rp2.897.909.555.

Dokumen hasil kinerja capaian output selama tahun 2024:

a) 7 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran terdiri dari Dokumen Rancangan Grand Design K/L Tahun 2025-2045, Dokumen Rancangan Renstra K/L Tahun 2025-2029, Dokumen Renja K/L TA 2025, Dokumen Revisi Renja K/L TA 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2024, Dokumen RKA K/L TA 2025, dan Dokumen Revisi RKA K/L TA 2024, b) 6 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yakni Laporan Triwulan IV Tahun 2023, Laporan Tahunan Tahun 2023; Laporan Kinerja (LKj/LAKIP) Tahun 2023; Laporan Triwulan I Tahun 2024; Laporan Triwulan II Tahun 2024; Laporan Triwulan III Tahun 2024, c) 32 dokumen Manajemen Keuangan yang terdiri dari 12 Dokumen Keuangan Pusat; 12 Dokumen Keuangan Perwakilan; 8 Dokumen Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari 4 Laporan Keuangan Ombudsman RI (Unaudited, Audited, Semester I, dan Triwulan III); 4 Laporan Triwulan Pengelolaan Dokumentasi Arsip Keuangan.